



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PIDATO KETUA BPK RI

PADA ACARA

**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BPK RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
(LKPP) TAHUN 2024 DAN IHPS II TAHUN 2024
KEPADA DPR RI**

JAKARTA, 27 MEI 2025



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

***Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk kita
semua, Om Swastiasthu, Namó Buddhaya, Salam
Kebajikan.***

Yang terhormat,

- Ketua DPR RI;
- Para Wakil Ketua DPR RI;
- Wakil Ketua BPK RI;
- Para Anggota DPR RI;
- Para Anggota BPK RI; serta

Hadirin yang berbahagia.

Perkenankan kami untuk mengawali hari yang berbahagia ini dengan ucap syukur yang mendalam kepada ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat dan ridho-NYA, menganugerahkan kita kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024.

Kami juga menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR yang telah berkenan untuk hadir pada acara ini sebagai refleksi komitmen kuat dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara.

Pimpinan dan Para Anggota DPR, serta Hadirin yang kami muliakan,

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN. Sesuai amanat perundang-undangan, Pemerintah telah menyerahkan LKPP Tahun 2024 (*Unaudited*) kepada BPK pada 21 Maret 2025 untuk diperiksa.

Alhamdulillah, kami telah merampungkan pemeriksaan tersebut, dan pada hari ini kami sampaikan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap keuangan negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2024. Opini WTP ini didasarkan pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2024.

Meskipun dua LKKL, yakni Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2024 secara keseluruhan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2024 dalam bentuk LKPP Tahun 2024 secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, diungkapkan secara memadai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan didasarkan pada efektivitas sistem pengendalian intern.

Pimpinan dan Para Anggota DPR, serta Hadirin yang kami muliakan,

BPK sangat mengapresiasi dukungan DPR RI yang krusial dalam mendorong pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel, diantaranya melalui temuan pemeriksaan BPK yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR dalam merumuskan kebijakan dan pengawasan anggaran.

Meskipun secara material tidak mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2024, BPK juga menyampaikan beberapa temuan pemeriksaan untuk perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkelanjutan.

Salah satu area yang menjadi perhatian utama adalah pelaporan kinerja yang terintegrasi ke dalam Catatan atas LKPP (CaLK) Tahun 2024 yang masih memerlukan penguatan dari segi sumber daya, metodologi, dan pedoman penyusunan.

Meskipun masih membutuhkan penguatan kerangka regulasi, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) diharapkan mampu menyajikan informasi yang lebih komprehensif mengenai penggunaan anggaran negara sesuai sasaran.

Informasi ini akan menjadi fondasi esensial dalam merumuskan langkah-langkah strategis kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan upaya krusial untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, selaras dengan amanat konstitusi, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peranan fundamental dalam mengawasi dan memastikan akuntabilitas penggunaan APBN demi kepentingan nasional.

Temuan pemeriksaan lainnya diantaranya, perbedaan data penyetoran PPN dan PPh dengan data wajib pajak dan wajib pungut yang tidak dapat terdeteksi secara langsung oleh sistem perpajakan; pengendalian belanja pegawai yang belum sepenuhnya memadai; pengendalian sisa dana transfer ke daerah yang ditentukan penggunaannya belum sepenuhnya memadai; serta

kebijakan penyajian Belanja Dibayar Di Muka belum sepenuhnya memadai dan penyelesaian pertanggungjawabannya berlarut-larut.

Pimpinan dan Para Anggota DPR, serta Hadirin yang kami muliakan,

Di tengah tekanan fiskal yang dihadapi, menjadi krusial untuk mengawal alokasi belanja negara agar memberikan dampak langsung pada rakyat.

Kami berharap, DPR dapat terus mendorong pengalihan belanja yang kurang produktif menjadi belanja prioritas yang berdampak nyata, sejalan dengan upaya yang telah diinisiasi Pemerintah.

Visi Asta Cita yang memandu kebijakan nasional kini telah diformulasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dimana peran DPR sangatlah sentral dalam mengawal implementasi program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan Swasembada Pangan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dasar rakyat terpenuhi dan setiap program mencapai sasaran yang tepat.

Dan tak kalah pentingnya, untuk menjamin manfaat optimal dari program pembangunan, Pemerintah perlu terus meningkatkan tata kelola dan memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.

BPK melihat pengembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi penting dalam upaya ini. DPR menjadi katalisator untuk terus mengawal dan mendukung inisiatif strategis seperti DTSEN demi tercapainya akuntabilitas dan efektivitas program secara maksimal.

Pimpinan dan Para Anggota DPR, serta Hadirin yang kami muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan pula Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 yang merupakan ringkasan atas 511 LHP dan terdiri atas 16 LHP Keuangan, 227 LHP Kinerja serta 268 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Selama semester II 2024, BPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dari kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp 43,43 triliun serta mendorong penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/*public service obligation* (PSO)/Kompensasi tahun 2023 sebesar Rp1,09 triliun.

Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan telah dilakukan Pengembalian ke kas negara/daerah/perusahaan/badan lainnya pada saat pemeriksaan sebesar Rp1,00 triliun.

Selain menyelamatkan keuangan negara, BPK turut berperan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara melalui dukungan pemberantasan korupsi, diantaranya melalui Pemeriksaan Investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp2,21 triliun; Penghitungan Kerugian Negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp2,83 triliun, dan Pemberian rekomendasi bersifat strategis.

Rekomendasi ini diantaranya mencakup penetapan tata cara pengisian kuota jamaah haji, verifikasi dan validasi data penerima dan penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta

kajian komprehensif evaluasi kebijakan dalam rangka pencapaian target pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT).

IHPS II 2024 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode tahun 2005 hingga 2024 dan pemantauan atas hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara serta pemberian keterangan ahli periode 2017 hingga 2024.

Seluruh informasi lengkap dalam IHPS II 2024 dapat diakses melalui laman ihps.bpk.go.id.

Pimpinan dan Para Anggota DPR, serta Hadirin yang berbahagia,

Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.

Kami menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan DPR RI terhadap pemeriksaan BPK yang menjadi fondasi krusial bagi peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Dengan semangat kebersamaan dan optimisme, mari kita terus berkarya mewujudkan Indonesia yang lebih berdaya dan sejahtera.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi setiap ikhtiar luhur kita demi kemajuan bangsa dan tanah air tercinta. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Bilहितtaufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Om Shanti shanti shanti Om

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua**

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

